

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini, setelah pembahasan sebelumnya terkait eksistensi dan implementasi keterbukaan informasi publik, penulis dapat menarik kesimpulan sesuai hasil penelitian sebagai berikut.

Secara umum dapat disimpulkan terkait eksistensi dan implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web resmi pemerintah daerah di Jawa Timur masih belum maksimal. Masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu :

- 1) Eksistensi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur sebagai media keterbukaan informasi publik masih belum maksimal. Hanya terdapat sebagian yang menerapkan keterbukaan informasi publik yaitu dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur hanya 28 Kabupaten/Kota atau 76% saja yang sudah menerapkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Terkait implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web resmi pemerintah daerah di Jawa Timur dirasa sudah cukup bagus, dikarenakan dari 28 situs website pemerintah di Jawa Timur yang sudah menerapkan keterbukaan informasi keuangan sudah menyajikan informasi keuangan yang baru minimal pada tahun periode sebelumnya serta dilakukan secara berkala atau update data secara berkala seperti (LRA, Neraca, APBD, LAK dan lain sebagainya).

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan saran-saran yang berkaitan dengan kendala pelaksanaan *E-Government* di pemerintah daerah di Jawa Timur, antara lain :

- 1) Terkait eksistensi situs web pemerintah daerah di Jawa Timur sebaiknya perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan, mengingat pada hasil penelitian ini masih terdapat situs web pemerintah di Jawa Timur yang tidak menerapkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Situs web pemerintah sebagai media penyampai informasi publik, ada baiknya jika dikelola oleh orang yang paham tentang aturan dalam penyampaian informasi tersebut. Sehingga, pelatihan atau sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi dirasa perlu untuk dilakukan dengan serius. Dengan demikian informasi yang wajib disampaikan terkait dengan indikator implementasi Keterbukaan Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat.